

Koneksi Politik, Kepemilikan Pemerintah dan Pengungkapan *Sustainability Reporting*

Made Danartha Sutawan¹
Eka Ardhani Sisdyani²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences : danarthasutawan@gmail.com

ABSTRAK

Sustainability reporting atau laporan keberlanjutan berisikan informasi di luar kinerja keuangan perusahaan. Beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan besar dalam pengungkapan *sustainability reporting* di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh koneksi politik dan kepemilikan pemerintah pada pengungkapan *sustainability reporting*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan asal Indonesia yang mendapatkan peringkat ASRRAT pada tahun 2018-2020. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan dua kriteria yaitu, perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan dan *sustainability report* dari tahun 2017-2019. Penelitian ini mendapatkan hasil koneksi politik berpengaruh positif pada pengungkapan *sustainability report*, sedangkan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh pada pengungkapan *sustainability report*. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa adanya bukti dari teori legitimasi, yakni perusahaan dikatakan memiliki sebuah kontrak sosial yakni *sustainability report* dengan lingkungannya.

Kata Kunci: *Sustainability Report*; Koneksi Politik; Kepemilikan Pemerintah

Political Connections, Government Ownership and Disclosure of Sustainability Reporting

ABSTRACT

Sustainability reporting is a report that contains information outside the company's financial performance. In recent years, there are much increase in the disclosure of sustainability reporting in Indonesia. The purpose of this study is to explain how political connections and government ownership affect the disclosure of sustainability reports. This research was conducted at companies from Indonesia that were ranked on ASRRAT in 2018-2020. Determination of the sample using a purposive sampling method with two criteria, such as companies that publish annual reports and sustainability reports from 2017-2019. The data in this study were analyzed using multiple linear regression analysis techniques. The results of this study indicate that political connections have a positive effect on the disclosure of the sustainability report, but government ownership does not affect the disclosure of the sustainability report. The results of this study also prove there is evidence from the theory of legitimacy, that is the company has a social contract, namely a sustainability report with its environment.

Keywords: *Sustainability Report*; *Political Connection*; *Government Ownership*

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 8
Denpasar, 26 Agustus 2022
Hal. 2047-2057

DOI:
10.24843/EJA.2022.v32.i08.p07

PENGUTIPAN:
Sutawan, M. D. & Sisdyani, E.
A. (2022). Koneksi Politik,
Kepemilikan Pemerintah dan
Pengungkapan *Sustainability
Reporting*. *E-Jurnal Akuntansi*,
32(8), 2047-2057

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
8 Maret 2022
Artikel Diterima:
21 Juli 2022

PENDAHULUAN

Pada umumnya perusahaan didirikan untuk mendapatkan keuntungan atau laba sebagai salah satu bukti kinerja perusahaan. Namun demikian, perusahaan juga dituntut untuk terlibat, berpartisipasi dalam aktivitas sosial di masyarakat. Seluruh aktivitas sosial seharusnya dilaporkan kepada para *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan diperlukannya legitimasi perusahaan dari masyarakat. Pelaporan aktivitas tersebut dikenal dengan nama *sustainability report*, yang dapat dilakukan secara sukarela oleh perusahaan dengan melaporkan aktivitasnya melalui tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan (Hasanah *et al.*, 2017).

Sustainability reporting menjadi penting dikarenakan dapat membantu perusahaan dalam mengontrol dampak sosial dan lingkungan di sekitarnya akibat operasional perusahaan (Dewi & Sudana, 2015). Konsep *sustainability reporting* ini diambil dari konsep dasar *Triple Bottom Line* yang merupakan lanjutan dari konsep *sustainable development* (Elkington, 1997). *Sustainability reporting* merupakan laporan yang memuat informasi di luar kinerja keuangan perusahaan. Informasi yang dimaksud tersebut adalah informasi aktivitas sosial yang membuat perusahaan dapat bertumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Menurut Fitriani *et al.*, (2020), *sustainability reporting* dapat digunakan oleh perusahaan untuk mempertahankan kepercayaan *investor* melalui pengimplementasian tindakan yang memiliki dampak keberlanjutan. *Sustainability reporting* dapat berisi pernyataan mengenai informasi keberlanjutan perusahaan yang berkaitan dengan kinerja perusahaan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi (Weda & Sudana, 2021).

Beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan besar dalam pengungkapan *sustainability reporting* di Indonesia. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari capaian Indonesia dalam meraih peringkat tertinggi dari 27 negara akan kepercayaan publik terhadap keterbukaan informasi pada *Sustainable Report* menurut hasil survei *GlobeScan* dan *Global Reporting Initiative* (GRI) tahun 2020 (mediaindonesia.com, 26 Oktober 2020). Hal ini membuktikan bahwa kinerja mayoritas perusahaan di Indonesia sudah sesuai dengan standar pengungkapan tiga aspek dasar laporan keberlanjutan. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya keyakinan bahwa pengungkapan *sustainability reporting* dapat meningkatkan nilai perusahaan (Goettsche *et al.*, 2016).

Pengungkapan *sustainability reporting* di Indonesia bersifat *voluntary* dan *mandatory* sesuai peraturan pemerintah (Setyastri & Wirajaya, 2017). Pelaporan *sustainability report* di Indonesia dianggap masih bersifat *voluntary* dikarenakan masih rendahnya pengungkapan *sustainability report* (Harymawan *et al.*, 2020) dan tingkat keterbacaan *sustainability report* di Indonesia (Adhariani & du Toit, 2020). Secara *mandatory*, Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan dua peraturan mengenai *sustainability report* yakni POJK No.51/POJK.03/2017 dan Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/04/2021 (Gunarsih & Ismawati, 2018). OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/POJK.03/2017 yang mengatur mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Menurut peraturan tersebut, *sustainability report* adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat mengenai kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu

lembaga jasa keuangan (LJK), emiten dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Selain dengan POJK No.51/POJK.03/2017, perusahaan milik negara/ daerah juga dituntut untuk melaksanakan dan melaporkan aktivitas sosial yang dilakukannya, menurut Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/04/2021. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Saraswati *et al.*, (2020) yang menemukan hubungan positif antara kepemilikan pemerintah dengan pengungkapan *sustainability reporting*. Perusahaan yang sebagian besar sahamnya menjadi milik pemerintah akan terpengaruh oleh hak suara yang dimiliki pemerintah (Eryadi *et al.*, 2021). Kepemilikan pemerintah dianggap dapat menjadi media yang efektif untuk mengawasi kinerja manajemen dan memberikan peningkatan kinerja suatu perusahaan (Hunardy & Tarigan, 2017). Pemerintah dapat mengontrol kebijakan yang diambil manajemen perusahaan agar sesuai dengan kepentingan dan aspirasi pemerintah. Pemerintah yang memiliki pandangan jauh ke depan mengenai *sustainability reporting* akan mendorong perusahaan yang dimilikinya untuk melakukan pengungkapan *sustainability reporting* (Eryadi *et al.*, 2021). Pengungkapan tersebut dianggap menjadi cara perusahaan milik negara/ daerah mendapat legitimasi di masyarakat. Namun, perusahaan juga bisa mendapatkan legitimasi melalui koneksi politik yang dimilikinya. Legitimasi yang didapatkan dari aktivitas sosial perusahaan dapat digantikan dengan adanya keuntungan koneksi politik yang dimiliki perusahaan (Muttakin *et al.*, 2018). Hal ini didukung oleh beberapa penelitian yang menunjukkan kecenderungan menurunnya pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang memiliki koneksi politik (Hung *et al.*, 2018), (Jahid *et al.*, 2020), dan (Saraswati *et al.*, 2020). Berdasarkan hal tersebut, koneksi politik dan kepemilikan pemerintah merupakan dua kekuatan yang berlawanan dalam mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Saraswati *et al.*, 2020).

Penelitian ini mereplikasi Saraswati *et al.*, (2020) dengan beberapa perbedaan, yaitu pedoman pengungkapan yang dirujuk dan populasi penelitian. Pedoman pengungkapan *sustainability reporting* pada penelitian ini menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh OJK yaitu POJK No.51/POJK.03/2017. Standar tersebut dipilih dikarenakan terdapat ketentuan untuk melaporkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan *sustainability report*. Pelaporan tersebut dapat menjadi bukti tambahan mengenai pengaruh koneksi politik yang dimiliki pemangku kepentingan pada tingkat pengungkapan *sustainability reporting*. Replikasi pada penelitian ini dilakukan karena hasil dari penelitian sebelumnya masih belum konsisten menunjukkan pengaruh koneksi politik dan kepemilikan pemerintah pada pengungkapan *sustainability reporting*.

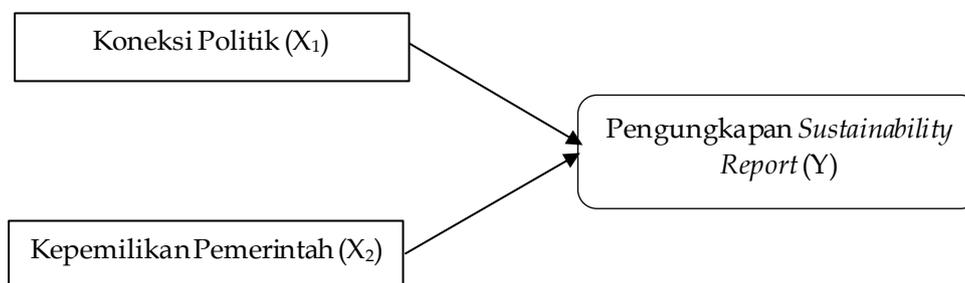
Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik ketika salah satu anggota direksi atau komisaris memiliki hubungan politik. (Saraswati *et al.*, 2020). Terdapatnya koneksi politik menyebabkan menurunnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan salah satu bagian dari *Sustainability reporting* (Hung *et al.*, 2018), (Jahid *et al.*, 2020) dan (Saraswati *et al.*, 2020). Berdasarkan teori, legitimasi perusahaan dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya (Bianchi *et al.*, 2019). Perusahaan dengan koneksi politik diasumsikan memiliki legitimasi yang seharusnya didapat melalui pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dapat digantikan dengan adanya keuntungan dari

koneksi politik (Muttakin *et al.*, 2018). Koneksi politik dapat memfasilitasi perusahaan untuk mengurangi ancaman pengadilan karena kurangnya pengungkapan publik (Hung *et al.*, 2018). Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

H₁ : Koneksi politik anggota direksi dan komisaris berpengaruh negatif pada pengungkapan *Sustainability reporting*.

Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah terlihat lebih bagus secara politik, sehingga perlu mempertahankan legitimasinya (Saraswati *et al.*, 2020). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah memiliki hubungan positif dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Muttakin & Subramaniam, 2015; Saraswati *et al.*, 2020). Menurut Lau *et al.* (2016), perusahaan dengan kepemilikan pemerintah dianggap juga sebagai kepemilikan masyarakat, dikarenakan hal tersebut maka perusahaan akan berusaha untuk mewujudkan ekspektasi masyarakat terkait pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut berkaitan dengan teori stakeholder, teori ini mengetakan bahwa perusahaan akan berusaha untuk mengungkapkan lebih banyak item *sustainability report* untuk memenuhi ekspektasi dari para stakeholder (Rokhlinasari, 2015). Wuttichindanon (2017) mengatakan bahwa perusahaan yang pemegang saham besarnya adalah pemerintah maka tingkat pengungkapan *sustainability reporting*-nya makin tinggi. Menurut penelitian Saraswati *et al.*, (2020), peraturan daerah setempat juga mempengaruhi adanya hubungan positif kepemilikan pemerintah pada *sustainability reporting*. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh hasil dari Rizky & Afri Yuyetta (2015) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan kepemilikan pemerintah pada pengungkapan *sustainability reporting*. Pada penelitian yang dilakukan Aman *et al.*, (2015) menunjukkan adanya hubungan positif kepemilikan pemerintah pada *sustainability reporting* pada perusahaan di Malaysia. Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dijelaskan, maka hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut.

H₂ : Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif pada *Sustainability reporting*.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Sumber: Data Penelitian, 2021

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif ini mencari hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan

dari Indonesia peraih peringkat ASRRAT periode 2018-2020 dengan total populasi 120 perusahaan. Terdapat beberapa kriteria dalam pemilihan sampel dalam penelitian ini, yaitu perusahaan dari Indonesia peraih penghargaan ASRRAT tahun 2018-2020 yang mempublikasikan laporan tahunan dan *sustainability report* pada periode pengamatan dari tahun 2017-2019 .

Berdasarkan proses seleksi sampel tersebut, terdapat total 98 perusahaan yang dijadikan sampel. Pada proses pengolahan data penelitian, terdapat dua data yang mengandung data *outlier* berdasarkan uji *box-plot*. Data yang mengandung uji *outlier* harus dihilangkan, sehingga sampel pada penelitian menjadi 96 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian arsip. Menurut Moleong (2018:18) penelitian arsip atau *archival research* merupakan penelitian berdasarkan dokumen atau arsip-arsip terdahulu yang berasal dari data eksternal. Dokumen atau arsip data-data dalam penelitian didapatkan dari laporan keuangan dan *sustainability reporting* perusahaan peraih ASRRAT periode 2018-2020.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik didefinisikan sebagai perusahaan dengan salah satu pemegang saham besarnya atau jajaran eksekutif puncak seperti dewan komisaris, dewan direksi serta sekretaris dari perusahaan tersebut memiliki koneksi dengan anggota parlemen, koneksi dengan Menteri atau Kepala Negara dan koneksi dengan Pejabat Tinggi. Penilaian skor pada penelitian ini mengacu pada (Supatmi *et al.*, 2019). Pemberian skor dibedakan antara pihak yang sedang atau masih menjabat pada periode penelitian dan pihak yang sudah tidak menjabat. Perbedaan tersebut yaitu skor lebih besar diberikan pada perusahaan yang terkoneksi politik dengan pejabat yang masih aktif, dengan skor 2 (terendah) hingga 9 (tertinggi). Sedangkan, pihak koneksi politik yang sudah tidak menjabat akan diberi skor 1 (terendah) hingga 8 (tertinggi). Untuk perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik akan diberi skor 0. Total skor dihitung menggunakan logaritma natural skor Indeks Koneksi Politik (IKP) ditambah satu poin. Penambahan skor satu poin mempertimbangkan adanya kecondongan indeks koneksi politik serta terdapat perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik (Tao *et al.*, 2017). Dapat dituliskan rumus Indeks Koneksi Politik sebagai berikut.

$$\text{Ln (IKP)} = \text{Ln}(1 + \text{IKP}) \dots\dots\dots(1)$$

Kepemilikan pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketika pemerintah menjadi pemegang saham besar pada perusahaan yakni di atas 20%. Hal ini berdasarkan PSAK 15 yakni investor yang memiliki hak suara lebih dari 20% maka akan dianggap memiliki pengaruh signifikan. Mengacu pada penelitian yang dilakukan (Saraswati *et al.*, 2020), kepemilikan perusahaan direpresentasikan menggunakan variabel *dummy*. Ketika saham perusahaan dimiliki lebih dari 20% oleh pemerintah maka akan diberi nilai 1, jika di bawah 20% maka akan diberi nilai 0.

Sustainability reporting atau laporan keberlanjutan adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang berisi mengenai kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan (LJK), emiten dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Standar yang dipakai pada penelitian ini adalah POJK No. 51/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan

Perusahaan Publik. Dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 dijelaskan bahwa laporan keberlanjutan minimal memuat informasi sebanyak 25 poin. Roviqoh & Khafid (2021) menyatakan bahwa pengungkapan *sustainability reporting* dapat dihitung menggunakan pengukuran dengan rumus sebagai berikut.

$$SR\ index = \frac{\sum\ item\ yang\ diungkapkan}{Total\ Pengungkapan\ menurut\ POJK\ (25\ poin)} \dots\dots\dots (2)$$

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis tersebut didasarkan pada terdapatnya hubungan fungsional atau kausal antara dua atau lebih variabel independen atau bebas dan satu variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2017:206). Penelitian ini akan menganalisis koneksi politik dan kepemilikan pemerintah terhadap *sustainability reporting*. Adapun persamaan umum regresi berganda, sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan :

- Y = *Sustainability reporting*
- α = Nilai Konstanta
- β_1 - β_2 = Koefisien regresi setiap variabel independent
- X_1 = Koneksi politik
- X_2 = Kepemilikan pemerintah
- ε = Standar *error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atau gambaran dari sebuah data yang dilihat dari *mean*, standar-deviasi, maksimum-minimum dan jumlah sampel. Pada penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sebanyak 96 perusahaan didapat dari hasil seleksi sampel dan uji outlier. Variabel independen pada penelitian ini adalah koneksi politik (X_1) dan kepemilikan pemerintah (X_2). Sedangkan, variabel dependen pada penelitian ini adalah *sustainability report* (Y). Hasil statistik deskriptif pada penelitian ini tercantum pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X_1	96	1	43	15,24	11,146
X_2	96	0	1	0,41	0,494
Y	96	0,56	1	0,830	0,102
Valid N (<i>listwise</i>)	96				

Sumber : Data sekunder diolah (2021)

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai minimum variabel X_1 yakni koneksi politik berasal dari PT. ABM Investama Tbk. sebesar 1 poin pada tahun 2017. Sedangkan, nilai maksimum variabel ini berasal dari PT. Timah Tbk. sebesar 43 poin pada tahun 2019. Variabel ini memiliki nilai rata-rata sebesar 15,24 yang mendekati nilai minimum. Hal tersebut berarti perusahaan memiliki nilai koneksi politik yang rendah selama periode amatan. Nilai standar deviasi pada variabel ini sebesar 11,146. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa sebaran data koneksi politik sudah merata atau rentang data satu perusahaan dengan yang lainnya tergolong rendah.

Variabel X_2 yaitu kepemilikan pemerintah memiliki nilai rata-rata sebesar 0,41 yang cenderung mendekati nilai minimum. Hal ini berarti kepemilikan pemerintah tergolong sedikit pada perusahaan ketika periode pengamatan. Nilai standar deviasi menunjukkan hasil sebesar 0,494, hasil tersebut lebih besar dari nilai rata-rata. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebaran data kepemilikan pemerintah belum merata pada perusahaan yang diamati.

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu *sustainability report* menunjukkan nilai minimum sebesar 0,56 yang berasal dari PT. Pengembangan Pelabuhan Nusantara Jaya Tbk. pada tahun 2019. Sedangkan, nilai maksimum berasal dari PT. Pupuk Indonesia Persero dengan nilai 1 pada tahun 2019. Nilai rata-rata pada variabel ini sebesar 0,83 mendekati nilai maksimum. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan melaporkan *sustainability report* cukup tinggi. Standar deviasi pada variabel *sustainability report* memiliki nilai 0,102, lebih rendah dari nilai rata-rata variabel. Hal ini berarti sebaran data *sustainability report* sudah merata atau rentang data antar perusahaan cukup rendah.

Setelah dilakukan uji statistik deskriptif, data selanjutnya melalui proses uji analisis regresi linear berganda. Analisis Regresi Linear Berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Koneksi Politik (X_1) dan Kepemilikan Pemerintah (X_2) pada pengungkapan *Sustainability Report* (Y) di perusahaan asal Indonesia yang mendapatkan penghargaan ASRRAT. Hasil uji analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,797	0,017		46,086	0,000
X_1	0,003	0,001	0,306	2,480	0,015
X_2	-0,024	0,026	-0,114	-0,925	0,357

Sumber: Data sekunder diolah (2021)

Berdasarkan hasil pada tabel 6, maka persamaan analisis regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$Y = 0,797 + 0,003X_1 - 0,024X_2 + \varepsilon$$

Dari persamaan analisis regresi linear berganda diatas, maka dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta (α) sebesar 0,797 memiliki arti bahwa ketika X_1 dan X_2 bernilai nol maka nilai *Sustainability Report* memiliki nilai sebesar 0,797 satuan. Selanjutnya, nilai Koefisien Koneksi Politik (β_1) senilai 0,003 memiliki arti bahwa ketika Koneksi Politik meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka nilai *Sustainability Report* akan meningkat sebesar 0,003 satuan. Sedangkan untuk nilai Koefisien Kepemilikan Pemerintah (β_2) senilai -0,024 memiliki arti bahwa ketika Kepemilikan Pemerintah meningkat sebesar satu satuan dan nilai variabel lainnya konstan, maka nilai *Sustainability Report* akan menurun sebesar 0,024 satuan.

Setelah dilakukan analisis regresi linear berganda, pengujian dilanjutkan dengan uji kelayakan model (uji F). Uji kelayakan model atau Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi pada penelitian layak digunakan atau tidak untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Hasil uji f dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,065	2	0,033	3,283	0,042
	Residual	0,924	93	0,010		
	Total	0,989	95			

Sumber: Data sekunder diolah (2021)

Model regresi dapat dikatakan layak jika nilai signifikansi pada uji lebih kecil atau sama dengan 0,05. Pada tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada uji ini bernilai 0,042. Hal tersebut berarti uji model regresi yang digunakan pada penelitian ini layak digunakan.

Langkah selanjutnya yakni melakukan uji koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018). Pada penelitian dengan tiga variabel atau lebih, nilai yang digunakan untuk menentukan hasil uji koefisien determinasi adalah nilai *adjusted R square*. Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,257	0,066	0,046	0,099

Sumber: Data sekunder diolah (2021)

Semakin besar nilai *R square* pada hasil uji, maka semakin besar pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dapat dilihat pada tabel 8, nilai *adjusted R square* pada penelitian ini adalah 0,046 atau 4,6%. Hal tersebut berarti pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen hanya sebesar 4,6%, sedangkan sisanya sebesar 95,4% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independen.

Uji terakhir yakni uji hipotesis atau uji t diperlukan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam penelitian ini yakni Koneksi Politik dan Kepemilikan Pemerintah mempengaruhi variabel dependen yakni *Sustainability Report* secara parsial. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 6 di atas.

Pada uji t, pengaruh dan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat melalui nilai t-hitung dan nilai signifikansi. Variabel independen dikatakan memengaruhi variabel dependen ketika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan tabel 6, variabel koneksi politik menunjukkan nilai t-hitung sebesar 2,480 dan nilai signifikansi sebesar 0,015. Hal ini berarti bahwa variabel koneksi politik berpengaruh pada *sustainability report* dan memiliki hubungan positif sesuai nilai t-hitung. Sedangkan, pada variabel kepemilikan pemerintah menunjukkan nilai t-hitung sebesar -0,925 dan nilai signifikansi sebesar 0,357. Hal tersebut berarti variabel kepemilikan pemerintah tidak memengaruhi *sustainability report*. Dapat disimpulkan bahwa H₁ diterima, namun hubungan antar variabel tidak sama dengan hipotesis. Sedangkan, H₂ pada penelitian ini ditolak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif pada pengungkapan *sustainability report*. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi tingkat koneksi politik pada perusahaan maka pengungkapan *sustainability report* yang dilakukan akan semakin tinggi. Tingginya tingkat koneksi politik berkaitan dengan banyaknya reputasi yang harus dijaga perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, perusahaan akan mengungkapkan lebih banyak item *sustainability report* untuk menjaga reputasi perusahaan. Sedangkan, variabel kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh pada pengungkapan *sustainability report*. Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain yang memengaruhi *sustainability report* pada perusahaan yang dimiliki pemerintah. Hal tersebut menguatkan pendapat mengenai terdapatnya indikasi bahwa perhatian pemerintah terhadap ekonomi berkelanjutan khususnya di perusahaan miliknya sendiri masih belum tinggi.

Koefisien determinasi pada penelitian ini tergolong kecil yakni sebesar 0,46 atau 4,6%. Hal tersebut berarti terdapat faktor lain yang lebih besar dalam memengaruhi *sustainability report*. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti mengenai faktor lain yang dapat memengaruhi *sustainability report*. Selain itu, bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian di luar ASRRAT dikarenakan terdapat indikasi perbedaan hasil penelitian. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat lebih memperdalam proses pencarian data contohnya menggunakan sumber data primer ataupun *database* terbaru untuk hasil yang lebih memadai kedepannya.

REFERENSI

- Adhariani, D., & du Toit, E. (2020). Readability of sustainability reports: evidence from Indonesia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 10(4), 621–636. <https://doi.org/10.1108/JAEE-10-2019-0194>
- Aman, Z., Ismail, S., & Bakar, N. S. (2015). Corporate Sustainability Reporting: Malaysian Evidence. *The 2nd International Conference on Management and Muamalah*, 2015(November), 287–299. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-1697-1>
- Dewi, K. E. C., & Sudana, I. P. (2015). Sustainability reporting dan profitabilitas (studi pada pemenang indonesian sustainability reporting awards). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 12(2015), 623–640.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks*. Capstone Publishing Limited. https://doi.org/10.9774/gleaf.978-1-907643-44-6_24
- Eryadi, V. U., Wahyudi, I., & Jumaili, S. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Mayoritas, Kepemilikan Pemerintah, dan Profitabilitas Terhadap Sustainability Reporting Assurance. *Conference on Economic and Business Innovation*, 1(1), 1052–1068.
- Fitriani, R., Hasanah, V. N., & Nuraina, E. (2020). Peran Political Connection sebagai Pemoderasi Sustainability Reporting terhadap Firm Value. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(2), 327–337.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progran IBM SPSS Edisi 9*. Undip. Abadi Tejkusumo.

- Goettsche, M., Steindl, T., & Gietl, S. (2016). Do Customers Affect the Value Relevance of Sustainability Reporting? Empirical Evidence on Stakeholder Interdependence. *Business Strategy and the Environment*, 25(3), 149–164. <https://doi.org/10.1002/bse.1856>
- Gunarsih, T., & Ismawati, Y. (2018). Sustainability Report and Firm Performance: Study in Mining and Metal and Food Processing Industry Indonesia Stock Exchange 2014-2017. *Journal of Governance and Integrity*, 2(1), 4–11. <https://doi.org/10.15282/jgi.2.1.2018.5533>
- Harymawan, I., Putra, F. K. G., Agni, T. D. K., & Kamarudin, K. A. (2020). Sustainability report practices in Indonesia: Context, policy, and readability. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(3), 438–443. <https://doi.org/10.32479/ijeep.8979>
- Hasanah, N., Syam, D., & Jati, A. W. (2017). Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 711–720. <https://doi.org/10.22219/jrak.v5i1.4992>
- Hunardy, N., & Tarigan, J. (2017). Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Intervening. *Business Accounting Review*, Volume 5(No. 2), 602–604. <http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/article/view/6636/6018>
- Hung, M., Kim, Y., & Li, S. (2018). Political connections and voluntary disclosure: Evidence from around the world. *Journal of International Business Studies*, 49(3), 272–302. <https://doi.org/10.1057/s41267-017-0139-z>
- Jahid, M. A., Rashid, M. H. U., Hossain, S. Z., Haryono, S., & Jatmiko, B. (2020). Impact of corporate governance mechanisms on corporate social responsibility disclosure of publicly-listed banks in Bangladesh. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(6), 61–71. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no6.061>
- Lau, C. M., Lu, Y., & Liang, Q. (2016). Corporate Social Responsibility in China: A Corporate Governance Approach. *Journal of Business Ethics*, 136(1), 73–87. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2513-0>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Remaja Rosdakarya.
- Muttakin, M. B., Mihret, D. G., & Khan, A. (2018). Corporate political connection and corporate social responsibility disclosures. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(2), 725–744. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2015-2078>
- Muttakin, M. B., & Subramaniam, N. (2015). Firm ownership and board characteristics: Do they matter for corporate social responsibility disclosure of Indian Companies? *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 6(2), 138–165. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-10-2013-0042>
- Rizky, Z., & Afri Yuyetta, E. N. (2015). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Pemerintah, Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Pemerintah, Daya Saing Industri, Serta Profitabilitas Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(1), 262–271.
- Rokhlinasari, S. (2015). Teori -Teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate

- Social Responsibility Perbankan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 7(1), 1-11.
- Roviqoh, D. I., & Khafid, M. (2021). Profitabilitas dalam Memediasi Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Business and Economic Analysis Journal*, 1(1), 14-26. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/beaj.v1i1.30142>
- Saraswati, E., Sagitaputri, A., & Rahadian, Y. (2020). Political Connections and CSR Disclosures in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11), 1097-1104. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.1097>
- Setyastrini, P., & Wirajaya, I. G. A. (2017). Intensitas Pengungkapan Corporate Social Responsibility: Pengujian dengan Manajemen Laba AkruaL dan Riil. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(1), 337-366.
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Supatmi, Sutrisno, T., Saraswati, E., & Purnomosidhi, B. (2019). The effect of related party transactions on firm performance: the moderating role of political connection in Indonesian banking. *Business: Theory and Practice*, 20, 81-92.
- Tao, Q., Sun, Y., Zhu, Y., & Yang, X. (2017). Political Connections and Government Subsidies: Evidence from Financially Distressed Firms in China. *Emerging Markets Finance and Trade*, 53(8), 1854-1868. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2017.1332592>
- Weda, N., & Sudana, I. P. (2021). Sustainability Reporting dan Return Saham di Perusahaan Terindeks LQ45. *E-Jurnal Akuntansi; Vol 31 No 6 (2021)DO - 10.24843/EJA.2021.V31.I06.P01* . <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/72507>
- Wuttichindanon, S. (2017). Corporate social responsibility disclosure – choices of report and its determinants: Empirical evidence from firms listed on the Stock Exchange of Thailand. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(2), 156-162. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.07.002>